

PERPUSTAKAAN DAN PENGENTASAN KESENJANGAN INFORMASI

Oleh: Himayah

(Dosen UIN Makassar)

ABSTRACT

Development of science and technology is marked by technological growth of communication and information means, particularly since 1990s. This growth influences human life aspect, including library. Technology of information truly provides, present, and promise the speed, which is one of the main factors within information management. The applied technology of information plays a very urgent role in a library. It's undebatable that technology of information can improve the library existence which finally can also improve the quality and quantity of performance and service in libraries.

Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT) setelah telegram, telepon, radio, televisi, dan komputer, maka banyak informasi menjadi lebih mudah diakses. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi di semua tempat dan pada semua orang, karena adanya kesenjangan yang disebabkan berbagai macam hal.

Hal itu menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini, yaitu kesenjangan informasi, yang jika tidak diantisipasi akan berdampak negatif terhadap perkembangan ekonomi, kebudayaan, dan sosial politik, terutama di negara-negara dunia ketiga

Konsep kemiskinan informasi ini sudah mulai dikenal pada tahun 1950an, dan sebenarnya sudah disadari jauh sebelumnya. Akan tetapi, sebuah dimensi baru ditambahkan pada pengertian kesenjangan atau kemiskinan informasi seiring dengan bergesernya era informasi. Pergeseran ini, diakibatkan oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK/ICT). Lievrouw dan Farb(2003: 499–538.) mengemukakan bahwa perdebatan tentang kesenjangan informasi tertutupi selama dekade terakhir oleh perkembangan kebutuhan TIK. Teknologi ini berkembang sangat pesat dan mengakibatkan tumbuhnya industri ilmu pengetahuan di negara maju. Hal ini semakin melebarkan jurang pemisah antara negara kaya dan miskin, mengakibatkan terciptanya istilah negara kaya informasi dan negara miskin informasi. Kesenjangan informasi bukan hanya sebuah keadaan politik, budaya atau sosio ekonomi saja. Kita hidup di masyarakat informasi global yang terus berkembang di mana kita lebih tergantung pada penciptaan, akses, berbagi dan pemanfaatan informasi lebih dari pada sebelumnya. Hal ini memunculkan pertanyaan dan kekhawatiran atas kebebasan, hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak untuk mendapatkan informasi dan pemerataan informasi.

Perpustakaan sejak dahulu kala menjadi tempat pencarian berbagai jenis informasi, terutama dalam bentuk tercetak. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi dalam banyak hal mempengaruhi perpustakaan, baik itu jenis koleksinya, penanganannya, cara penelusuran informasinya, serta layanan perpustakaan sendiri. Hal ini perlu diantisipasi oleh pustakawan yang bekerja di perpustakaan itu sendiri, terutama perpustakaan lembaga pendidikan.

B. PERMASALAHAN

Walaupun teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memainkan peranan penting dalam memilah-milah dunia ini menjadi kaya informasi dan miskin informasi, kemiskinan informasi tidak hanya dibatasi oleh “orang yang menguasai teknologi” dan “orang yang tidak menguasai teknologi”. Fenomenanya lebih kompleks, termasuk masalah keragaman bahasa dan budaya, tingkat pendidikan dan kemampuan untuk mengakses informasi dan mengambil manfaat dari informasi tersebut. Lebih lanjut, jurang pemisah antara si kaya informasi dan si miskin informasi bukan hanya dipisahkan oleh lingkungan dan negara. Juga antara individu-individu yang mungkin berada pada budaya yang sama dan tempat yang sama.

Melihat bahwa pada kenyataannya kemiskinan informasi mempengaruhi kehidupan banyak orang setiap harinya, maka seharusnya masalah ini menjadi tanggungjawab sosial. Hal ini sangat penting bahwa kelanjutan pembentukan masyarakat informasi harus diatur dengan prinsip-prinsip universal yang berdasarkan atas keadilan sosial. Karena itu dipandang perlu untuk mengenali akar permasalahan kemiskinan informasi secara lebih mendalam, dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini.

Perpustakaan sebagai sumber informasi seringkali belum melaksanakan fungsinya sebagai pusat pencarian informasi yang tepat sasaran. Seringkali para pencari informasi di perpustakaan tidak berhasil menemukan informasi yang mereka cari di perpustakaan. Sering pula tidak tersedia sarana dan layanan yang membantu penelusuran informasi yang efektif.

A. KESENJANGAN INFORMASI SEBAGAI SUATU FENOMENA

Konsep kesenjangan informasi dapat dibedakan melalui beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konektivitas informasi, pendekatan konten informasi, dan pendekatan aspek manusia, yang penekanannya adalah pada aspek pengetahuan manusia (Johannes J Britz.2004:192). Pendekatan-pendekatan tersebut dijabarkan di bawah ini.

1. Pendekatan konektivitas informasi

Pendekatan ini berfokus pada terbatasnya akses pada teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa ada hubungan sebab-akibat antara keadaan materi seseorang dan kemampuan akses informasi melalui TIK. Misalnya, pada umumnya informasi yang paling penting, seperti informasi yang berkaitan dengan ekonomi (seperti keadaan terkini bursa saham untuk keperluan investasi perseorangan) tersedia dalam bentuk elektronik (misalnya internet). Hal ini mengakibatkan orang-orang yang kemampuan

finansialnya terbatas atau pendidikannya rendah tidak akan dapat memanfaatkan teknologi ini. Orang-orang seperti ini berada di luar wilayah ekonomi dunia berbasis elektronik. Hal ini dipertegas oleh laporan Administrative Committee on Coordination (New York, United Nations Publications. 1997:24) suatu badan pemerintah di Amerika Serikat di bidang koordinasi administrasi berpendapat bahwa salah satu penyebab utama kemiskinan informasi di negara sedang berkembang adalah kurangnya akses kepada TIK.

2. Pendekatan konten informasi

Menurut pendekatan ini, tidak tersedianya informasi yang berkualitas dan kurangnya akses yang dibutuhkan merupakan penyebab awal kemiskinan informasi. Menurut Burgelman dkk (pada Britz.2004:192.) mengatakan bahwa perbedaan antara masyarakat kaya dan miskin informasi lebih dari sekedar masalah digitalisasi informasi, tapi juga keterjangkauan, ketersediaan dan kesesuaian informasi itu sendiri. Pendekatan ini juga berdasarkan atas asumsi bahwa orang miskin tidak mempunyai modal kebendaan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas (misalnya mereka hanya bisa membaca koran lama/bekas, karena tidak bisa berlangganan. Akibatnya informasi yang mereka terima selalu ketinggalan).

3. Pendekatan aspek manusia

Pendekatan aspek manusia dalam hal kemiskinan informasi tidak berdasarkan perumpamaan kaya miskin, tetapi berdasarkan pandangan hermenetika informasi. Informasi dipandang sebagai konstruksi sosial yang membantu manusia dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Karena itu akses informasi bukanlah merupakan satu-satunya aspek. Manusia harus memiliki kemampuan untuk mendapatkan informasi yang berguna. Kemampuan ini ditentukan oleh tingkat pendidikan, pengalaman dan faktor kontekstual lainnya. UNESCO(United Nations Development Programme. Poverty Report.New York, United Nations Publications. 1998: 31) cenderung untuk menggunakan istilah 'masyarakat pengetahuan (knowledge societies)' daripada 'masyarakat informasi (information societies)', yang lebih menekankan pentingnya pendidikan di era informasi ini.

Nath (2003) mengaitkan kemiskinan informasi dengan buta informasi (illiteracy) atau tidak memiliki kemampuan literasi informasi. Menurutnya, masyarakat di negara sedang berkembang tidak mampu untuk 'mengenali pengetahuan yang mereka miliki, memahami nilainya dan menggunakan kekuatan pengetahuan untuk mengembangkan diri'.

Singkat kata, karakteristik kemiskinan informasi merupakan sebuah fenomena sosial yang kompleks dan berkaitan dengan masalah geografis, baik skala internasional (negara-negara miskin informasi, misalnya negara-negara dunia ketiga) dan skala nasional dan regional (komunitas miskin informasi di wilayah tertentu).

Karena itu kemiskinan informasi dapat didefinisikan sebagai: suatu situasi dimana individu dan masyarakat, dengan konteks tertentu, tidak mempunyai keahlian, kemampuan dan materi untuk mendapatkan akses informasi yang efisien, dan ketidak mampuan untuk meninterpretasikan dan menerapkannya dengan tepat. Karakterisasinya adalah kurangnya informasi yang penting dan buruknya infrastruktur informasi yang ada.

D.FAKTOR PENYEBAB KEMISKINAN INFORMASI

Ada beberapa faktor penyebab kemiskinan informasi:

1. Faktor akses informasi

Penyebab utamanya adalah kurang atau tidak adanya akses pada informasi yang penting, dan jika walapun akses itu tersedia, terjadi ketidakmampuan untuk memanfaatkannya dengan tepat. Menurut data World Bank(1998:21), secara khusus hal ini adalah penyebab utama kemiskinan informasi. Bukan hanya tidak adanya pengetahuan yang berkaitan dengan proses pencarian informasi, tapi juga ketidak mampuan untuk menentukan nilai produk dan layanan informasi tersebut. Diperlukan keahlian untuk menguasai teknologi yang menyediakan akses kepada informasi. Pada banyak kasus di negara berkembang pada umumnya orang mampu mengakses dan menggunakan media tradisional, seperti media cetak, tetapi tidak mempunyai keahlian untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif.

2. Faktor sosial ekonomi dan infrastruktur informasi

Faktor sosial ekonomi terutama muncul sebagai akibat dari globalisasi dan integrasi pada kehidupan sosial ekonomi secara global, yang disebabkan oleh kapitalisme yang mengarahkan kepada ekonomi berbasis informasi. Hal itu juga menimbulkan munculnya jaringan ekonomi dan sosial yang dengan ciri globalisasi komunikasi, pembangunan infrastruktur informasi dan globalisasi tenaga kerja, produksi dan keuangan. Distribusi produk dan layanan informasi dan perangkat keras dan lunak sebagai pendukung sektor informasi menjadi sektor andalan pada beberapa negara kaya.

Selain dampak positif diatas, globalisasi juga mengakibatkan terjadinya kemiskinan informasi. Beberapa produk dan layanan informasi yang tadinya dianggap milik semua orang menjadi dikomersialisasi dengan adanya hukum hak intelektual, sehingga informasi bisa menjadi 'mata uang'. Misalnya informasi yang berkaitan dengan bidang medis, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara dunia ketiga. Contoh yang paling terkenal adalah hak cipta atas pembuatan obat AIDS, yang dilindungi dan dikomersialisasi, padahal penderita AIDS di Afrika membutuhkan obat gratis karena ketidakmampuan mereka untuk membeli obat komersil yang mahal.

Dalam hal infrastruktur informasi, tulang punggung negara-negara yang kaya informasi adalah infrasturktur informasi yang baik, yang memudahkan komunikasi informasi. Infrastruktur itu mulai dari perpustakaan, penerbit dan toko buku, distribusi media massa dan jaringan elektronik seperti internet, dan formulasi serta aplikasi kebijakan di bidang informasi.

Kebanyakan negara sedang berkembang tidak mempunyai infrastruktur informasi yang canggih seperti itu, yang mengakibatkan ketidakmampuan negara-negara tersebut untuk berpartisipasi dalam globalisasi informasi dan pertukaran pengetahuan.

3. Faktor konteks informasi setiap individu

Konteks yang dimaksud antara lain pesan dan simbol yang ditemui seseorang dalam percakapan dan interaksi melalui media. Implikasinya adalah, dua orang yang berbeda, berada dalam lingkungan yang sama, mempunyai interpretasi yang berbeda tentang sebuah informasi yang sama karena bergantung pada pengalaman dan pengetahuan (konteks informasi). Hal ini juga mengakibatkan bahwa seseorang dapat dianggap kaya informasi dan dapat menerapkan makna informasi dengan tepat. Sedangkan orang lain pada konteks atau situasi yang sama mungkin miskin informasi karena ketidakmampuan untuk memahami makna informasi pada konteks yang sama tersebut. Misalnya, ketika dua orang mahasiswa yang mendapat tugas kuliah tentang manajemen pengetahuan, mengakses artikel yang sama di internet berjudul “the importance of knowledge management”, salah satunya bisa memahami makna informasi tersebut karena mampu berbahasa Inggris dan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung di dalamnya untuk mengerjakan tugas, sedangkan yang lainnya, yang tidak mampu berbahasa Inggris, tidak memahami isi artikel tersebut dan tidak bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan tugas kuliahnya.

E. SOLUSI MENGATASI KEMISKINAN INFORMASI

1. Keadilan Informasi

Seperti halnya dengan mengatasi kemiskinan materi, keadilan bisa menjadi cara untuk mengatasi kemiskinan ini. Dalam hal ini keadilan berinformasi. Mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama, baik itu orang yang mampu ataupun tidak. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang sama, dan pihak yang kaya informasi bersedia menyediakan akses ke sarana informasinya bagi pihak yang miskin informasi. Juga antara kedua pihak juga harus berbagi (sharing) informasi, karena yang kaya informasi mungkin saja juga membutuhkan informasi tertentu dari yang hanya dimiliki oleh pihak yang miskin informasi. Selain itu semua pihak mempunyai hak yang sama dalam berpartisipasi di dunia informasi. Setiap orang di masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mengakses informasi penting yang diperlukan untuk mengembangkan diri. Selain itu perlu diciptakan kesempatan yang sama untuk menerapkan hak atas akses informasi tersebut.

Tentu saja hal tersebut banyak tergantung pada kesadaran berkeadilan informasi para pihak yang memiliki dan menguasai infrastruktur informasi yang baik. Jika mereka mau berbagi “harta informasi” itu kepada pihak lain yang membutuhkan, tentu hal tersebut akan sangat membantu pihak yang miskin informasi. Akan tetapi, sebenarnya yang diuntungkan bukan hanya para pihak yang diberikan bantuan tersebut, akan tetapi juga pihak kaya informasi. Karena belum tentu pihak kaya informasi telah memiliki semua informasi yang ada di dunia ini. Pihak miskin informasi juga mempunyai informasi-informasi tertentu yang mungkin dibutuhkan oleh pihak kaya informasi. Jadi hubungan saling berbagi informasi dan infrastrukturnya ini kemudian akan saling menguntungkan kedua belah pihak.

2. Literasi informasi

Belajar merupakan proses yang berlangsung seumur hidup, bukan hanya di pendidikan formal saja. Setiap orang perlu memiliki kemampuan intelektual untuk menganalisa dan berpikir kritis, dan juga mampu untuk membentuk kerangka untuk memaksimalkan proses belajarnya. Untuk dapat melakukan hal ini, diperlukan literasi informasi, atau biasa juga disebut keberaksaraan informasi. Literasi informasi adalah serangkaian keahlian untuk mengetahui kapan sebuah informasi tersebut dibutuhkan, dan mampu untuk menemukan, mengevaluasi dan menggunakan informasi tersebut secara efektif (Association of College and Research Libraries, pada Dorner:2006) Seseorang yang berliterasi informasi akan memahami bagaimana sebuah informasi bisa memahami bagaimana memanfaatkan informasi itu untuk meningkatkan pengetahuan, memperbaiki kinerja, kebutuhan spesifik mereka dan selanjutnya meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Karena itu, walaupun telah tersedia segala sarana dan infrastruktur informasi yang canggih, tetapi pemakainya tidak berliterasi informasi, kemiskinan informasi mungkin masih akan terjadi karenanya.

Peran perpustakaan sebagai salah satu lembaga penyedia informasi sangat penting dalam membantu penguasaan literasi informasi. Perpustakaan harus mempunyai berbagai bentuk sarana informasi, seperti buku, materi audiovisual, komputer dan akses internet. Juga mempunyai sarana penelusuran yang baik untuk membantu pencarian informasi dengan efektif, seperti katalog, terutama katalog online yang biasa juga disebut OPAC (Online Public Acces Catalog), ataupun katalog kartu dan sara bibliografi tercetak lainnya. Selain itu juga menyediakan layanan referensi untuk konsultasi pencarian informasi yang dilakukan oleh pustakawan yang ada di bagian ini. Pustakawan referensi harus mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang penelusuran informasi yang efektif, yaitu literasi informasi dan penguasaan teknologi informasi yang memadai. Bahkan perpustakaan harus menyelenggarakan pelatihan literasi informasi kepada pengguna perpustakaan, seperti pelatihan pendidikan pemakai, konsultasi penelusuran, pelatihan internet dan lain-lain.

Pustakawan juga perlu untuk meningkatkan kemampuannya terutama di bidang literasi informasi dan penguasaan teknologi informasi dengan mengikuti seminar/workshop literasi informasi, membuat diskusi dan pelatihan bersama dengan pustakawan lain, baik dari lembaga yang sama atau dari lembaga lain, mengadakan sharing atau temu-bicara untuk saling berbagi tentang kebutuhan, layanan dan kemajuan yang dicapai di perpustakaan masing-masing, dan memberdayakan dirinya sendiri dengan fasilitas yang tersedia baik di perpustakaan atau di organisasi induk.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diformulasikan bahwa kemiskinan informasi adalah:

1. Berkaitan dengan tidak adanya akses kepada informasi yang relevan dan sesuai.
2. Tergantung pada ada tidaknya infrastruktur informasi yang baik.
3. Sangat berkaitan dengan tingkat keberaksaraan, atau literasi informasi.

4. Juga ditentukan oleh sikap dan pendekatan kepada informasi dan nilai yang dapat diambil darinya.
5. Merupakan fenomena global, tapi dengan berbagai konteks yang berbeda.
6. Ada kaitannya dengan kurangnya modal materi untuk mengakses informasi.
7. Bukan hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tapi juga berkaitan dengan budaya dan tingkatan social di masyarakat.

Jelaslah, bahwa di era informasi, yang bercirikan globalisasi dan kapitalisme dan digerakkan oleh TIK, telah menyebabkan sebuah bentuk kemiskinan model baru: kemiskinan informasi. Hal ini berakibat buruk pada hampir semua aspek kehidupan perseorangan dan masyarakat. Bukan saja berakibat pada keterasingan, tetapi juga mengakibatkan ketergantungan masyarakat dan negara-negara miskin informasi kepada negara kaya informasi untuk kebutuhan akses informasi.

Selain dari hambatan ekonomi, politik, dan pendidikan yang diakibatkan oleh kemiskinan informasi ini, juga menyebabkan dilema etis yang berkaitan dengan kesadaran moral pihak yang kaya informasi. Alasan utama terletak pada ketidakadilan sosial yang muncul. Keadilan sosial ini akan membantu mengurangi kemiskinan informasi ini.

Perpustakaan yang baik adalah perpustakaan yang mempunyai berbagai bentuk sarana informasi, seperti buku, materi audiovisual, komputer dan akses internet. Juga mempunyai sarana penelusuran yang baik untuk membantu pencarian informasi dengan efektif, seperti katalog

DAFTAR PUSTAKA

- Administrative Committee on Coordination, 1997. *Statement on Universal Access to Basic Communication and Information Services*. United Nations Publications, New York.
- Dorner, Daniel G. dan G. E. Gorman, 2006. *Information Literacy Education in Asian Developing Countries: cultural factors affecting curriculum development and programme delivery*. IFLA Journal, <http://ifl.sagepub.com/cgi/content/abstract/32/4/281> (diakses tanggal 28 Oktober 2009)
- Britz, Johannes J. 2004. *To Know or not to Know: A Moral Reflection on Information Poverty*. *Journal of Information Science*,; 30; 192. <http://jis.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/3/192> (diakses tanggal 28 Oktober 2009)
- L.A. Lievrouw and S.E. Farb. 2003. *Information and equity*. In: B. Cronin (ed.), *Annual Review of Information Science and Technology (ARIST)*, Vol. 37. Information Today, Medford, 499–538.
- United Nations Development Programme. *Poverty Report*. United Nations Publications, New York, 1998.
- World Bank. *World Development Report*. 1998. *Knowledge for Development*. World Bank, New York.
- V. Nath, *Heralding ICT Enabled Knowledge Societies*. (Way Forward for the Developing Countries, 2001). <http://www.cddc.vt.edu/knownet/articles/heralding.htm> (21 Oktober 2009).